

DOI <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v11i2.5615>

Pembungkaman Narasi dan Suara Palestina Pasca Eskalasi Perang Israel-Palestina 2023

Muhamad Aufal Ghufon^{1*}

¹Departemen Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: muhamadaufalghufon@mail.ugm.ac.id

Abstract - The Israel–Palestine conflict is one of the world’s longest-running disputes and has escalated again following Hamas’s attack on October 7, 2023. Beyond the military arena, this conflict also raises issues of freedom of expression and the silencing of Palestinian writers internationally. This study employs a qualitative-descriptive approach to examine Palestinian literature as a space for articulating identity, resistance, and collective memory amid the Israel–Palestine conflict. This method enables the researcher to deeply interpret the social, political, and cultural dynamics reflected in literary texts and practices, as well as to trace systematic efforts to silence and marginalize Palestinian narratives on the global stage. The study analyzes three cancellation cases that represent patterns of silencing Palestinian narratives in cultural and academic spheres: Adania Shibli at the Frankfurt Book Fair (2023), Mohammed El-Kurd’s lecture at the University of Vermont (2023), and Randa Abdel-Fattah’s invitation at Adelaide Writers’ Week (2026). Three main silencing patterns are identified: legitimizing censorship for security reasons, political dominance in cultural/academic institutions, and transnational solidarity as a form of resistance. These practices reveal the vulnerability of the Palestinian narrative within global structures, yet also trigger collective resistance and international solidarity.

Abstrak - Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik berkepanjangan dalam sejarah dunia yang kembali meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain di ranah militer, konflik ini juga memunculkan persoalan kebebasan berekspresi dan pembungkaman narasi sastrawan Palestina secara internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menelaah sastra Palestina sebagai ruang artikulasi identitas, perlawanan, dan ingatan kolektif di tengah konflik Israel–Palestina. Metode ini memungkinkan peneliti menafsirkan secara mendalam dinamika sosial, politik, dan budaya yang tercermin dalam teks maupun praktik sastra, serta menelusuri upaya sistematis pembungkaman dan marginalisasi narasi Palestina di ranah global. Studi ini menganalisis tiga kasus pembatalan yang merepresentasikan pola pembungkaman narasi Palestina di budaya dan akademik: Adania Shibli di Frankfurt Book Fair (2023), kuliah Mohammed El-Kurd di University of Vermont (2023), dan undangan Randa Abdel-Fattah di Adelaide Writers’ Week (2026). Tiga pola utama pembungkaman teridentifikasi: legitimasi sensor dengan alasan keamanan, dominasi politik dalam institusi budaya/akademik, serta solidaritas transnasional sebagai bentuk resistensi. Praktik ini menunjukkan kerentanan narasi Palestina dalam struktur global, namun juga memicu perlawanan kolektif dan solidaritas internasional.

Keywords - Israel-Palestine Conflict, Palestinian Voice, Palestinian Writers.

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sejak deklarasi negara Israel pada tahun 1948. Hal itu tidak hanya melibatkan dimensi militer dan politik, tetapi juga melibatkan seluruh ranah

kehidupan di Palestina. Konflik Israel–Palestina merupakan konflik kolonial dan militer yang berkepanjangan, berdampak langsung pada hak hidup, hak atas tanah dan juga hak atas kebebasan berekspresi (Di Stefano, 2025). Konflik Israel–Palestina ini telah menimbulkan korban jiwa,

kehancuran infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit. Penyerangan terhadap fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Al Ahli di Gaza menunjukkan bagaimana ruang-ruang sipil yang seharusnya netral juga menjadi target militer, sehingga memicu kejahatan kemanusiaan berat (Saputro, 2016). Konflik itu mulai kentara dan semakin bergelora kembali di tahun 2023. Perang brutal yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober menghidupkan kembali perdebatan sengit mengenai akar penyebab konflik di Israel-Palestina. Mereka yang berpihak pada Israel bersikeras bahwa kekerasan tersebut berasal dari kebencian anti-Semit yang mematikan, mereka yang mendukung Palestina berpendapat bahwa pendudukan militer tirani Israel atas wilayah mereka sejak 1967 adalah penyebab utamanya (Samuel, 2023).

Dalam situasi demikian, sastrawan Palestina memegang peran penting sebagai pengungkap realitas, penjaga ingatan kolektif dan pengkritik kekerasan struktural. Melalui karya sastra, mereka dapat menafsirkan realitas yang terjadi ke dalam karya sastra, membungkus pengalaman kekerasan ke dalam dunia imajinasi. Dalam ranah global, konflik ini bukan hanya dipertarungkan dengan senjata, tetapi juga melalui perang narasi. Negara dan korporasi digital menjadi aktor sentral dalam membentuk wacana tentang siapa yang dianggap korban, pelaku, sah atau tidak sah untuk berbicara. Bahkan di Eropa dan Amerika Utara, penulis, akademisi, seniman dan aktivis yang menyuarakan dukungan bagi Palestina menghadapi kampanye pencemaran nama baik, pembatalan acara, hingga sanksi administratif, sehingga mengerosi hak kebebasan berekspresi secara lebih luas (Achenbach dkk., 2024).

Dalam konteks seni dan sastra, pola ini tampak dalam berbagai praktik *de platforming* seperti kuliah umum dan diskusi tentang Palestina dibatalkan, penulis dan seniman Palestina didiskreditkan dengan tuduhan antisemitisme dan ruang-ruang seni yang mengklaim dekolonial/*queer* justru mereproduksi iklim anti Palestina. Pembatalan kuliah Walaa Alqaisiya di Wina, yang dibaca sebagai bagian dari “arsitektur pembungkaman” yang mempertanyakan siapa yang boleh berbicara tentang Palestina dan dalam kerangka apa (Achenbach dkk., 2024).

Fenomena inilah yang menjadi konteks bagi kasus-kasus yang akan dikaji, (1) Pembatalan penghargaan Frankfurt Book Fair 2023 yang melibatkan penulis Palestina, (2) Pembatalan

pembacaan puisi dan kuliah Mohammed El Kurd di University of Vermont (AS) pada 2023, di tengah meningkatnya ketegangan perang Israel–Gaza, (3) Tidak diundangnya penulis Palestina Australia Randa Abdel Fattah ke Adelaide Writers’ Week 2026 (D. Clark, 2020; D’Auria, 2023; Mahmudah, 2025).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana sastrawan yang berperan sebagai suara Palestina diposisikan sebagai ancaman ketika mengkritik pendudukan Israel dan bagaimana lembaga budaya di Eropa/Amerika turut mereproduksi iklim anti Palestina melalui pembatalan, penyingkiran, atau delegitimasi suara mereka. Tulisan kolektif *Freedom Theatre* dan *Artists on the Frontline* menyebut kondisi ini sebagai bagian dari “genosida terhadap kebudayaan Palestina” dan menyerukan penghentian sensor artistik atas suara Palestina. Pada saat yang sama, jurnalis Palestina berada di garis depan risiko fisik dan digital. Dalam perang Israel–Gaza sejak Oktober 2023, ratusan jurnalis dan pekerja media, mayoritas Palestina, tewas, terluka, ditahan, atau diintimidasi (Fahmy dkk., 2024).

Penelitian kualitatif berbasis wawancara dengan 18 jurnalis Palestina di Gaza menunjukkan bahwa mereka menghadapi serangan udara, pemadaman listrik, gangguan komunikasi dan pembatasan akses yang menjadikan mereka “satu satunya mercusuar informasi” dari medan perang, sekaligus target nyata serangan. Pelarangan media seperti Al Jazeera, penggunaan sensor militer untuk melarang ratusan artikel dan sanksi terhadap surat kabar yang mengkritik pemerintah Israel menunjukkan bahwa sensor negara bekerja berdampingan dengan sensor korporasi digital. Pada tingkat *platform*, penelitian literatur dan laporan HAM menemukan adanya pola *censorship algorithmic* di Facebook dan Instagram, konten pro Palestina dihapus, akun diperlambat, jangkauan disengaja dikurangi dan fitur “live” dibatasi. Representasi simbolik emoji semangka, zaitun dan penggantian kata “Gaza” menjadi “G4z4” muncul sebagai bentuk “subversi simbolik” untuk mengelabui algoritma (Ozturk, 2024).

Pada sisi lain, media sosial juga menyediakan ruang perlawanan kreatif dan aktivisme bermain (*playful activism*). Analisis terhadap 500 video TikTok bertagor #gazaunderattack mengidentifikasi tiga pola memetik (*lip sync*, *duet*, *point of view*) yang memungkinkan pengguna, termasuk warga Palestina, memadukan humor, musik dan visual kekerasan untuk menyalurkan kemarahan,

solidaritas dan posisi politik. Praktik ini menurunkan ambang partisipasi politik dan menghadirkan bentuk keterlibatan demokratis yang dapat diakses khalayak luas (Cervi & Divon, 2023).

Penelitian berjudul “Pembungkaman Narasi dan Suara Palestina Pasca Eskalasi Perang Israel-Palestina 2023” berangkat dari kesenjangan bahwa kasus kasus pembatalan acara sastra seperti Frankfurt Book Fair, University of Vermont, Adelaide Writers’ Week, jarang dibaca secara sistematis bersama dengan kekerasan yang dialami sastrawan. Padahal sama sama memproduksi narasi konflik yang sama sama dibungkam (D. Clark, 2020; D’Auria, 2023; Mahmudah, 2025).

Penelitian serupa terkait pembungkaman suara Palestina sudah banyak dilakukan, terutama terkait tragedi yang dialami oleh para jurnalis Palestina, Pertama kebebasan berekspresi dan pembungkaman suara palestina. Analisis hukum HAM internasional menunjukkan konflik Gaza memicu krisis global kebebasan berekspresi: aktivis dan pendukung Palestina menghadapi pembatasan yang luas, mulai dari denda, pembatalan acara universitas, hingga pelarangan media dan sensor militer. Kegagalan melindungi hak berekspresi Palestina dipandang memperlemah perlindungan HAM secara umum (Amer & Ashour, 2026).

Studi pembatalan kuliah Walaa Alqaisiya di Wina memetakan konsep “arsitektur pembatalan” yaitu jaringan praktik defamasi, *deplatforming* dan penghapusan yang menopang iklim anti Palestina di akademi dan seni Eropa. Hal tersebut bagian dari pola kolonial dan orientalis yang mempertanyakan legitimasi suara Palestina, termasuk yang *queer* dan *decolonial* (Di Stefano, 2025).

Kedua, Jurnalis Palestina dalam Perang Israel–Gaza. Studi kualitatif tentang jurnalis Palestina di Gaza mengungkap hierarki pengaruh yang membentuk liputan perang yaitu faktor individu, rutinitas media, organisasi dan konteks sosial saling menjalin. Jurnalis menghadapi pembunuhan, luka, penahanan, intimidasi, serangan siber dan serangan terhadap keluarga, sekaligus pembatasan akses bagi jurnalis internasional yang memperbesar beban informasi di pundak jurnalis lokal (Fahmy dkk., 2024).

Ketiga, Media Sosial, Sensor Digital dan Aktivisme. Penelitian tentang TikTok #gazaunderattack menegaskan peran “playful activism”: lip sync, duet, dan POV memungkinkan

pengguna mengkombinasikan imitasi, humor, dan dokumentasi kekerasan menjadi aksi politik yang mudah diikuti (Cervi & Divon, 2023). Artikel mengenai PalesTranslation menjelaskan bagaimana warga Gaza menerjemahkan kisah pribadi ke bahasa Inggris di Instagram untuk menghubungkan diri dengan audiens global, membangun empati, dan menantang narasi dominan (Kulunk, 2025). Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini merumuskan masalah berikut, bagaimana pola pembungkaman terhadap sastrawan Palestina dalam tiga kasus ini, alasan yang digunakan, serta bagaimana respons publik membentuk resistensi mereka. Oleh karena itu, Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga kasus pembatalan guna mengidentifikasi pola pembungkaman, logika legitimasi yang digunakan oleh institusi, serta bentuk resistensi yang muncul.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif-Deskriptif. Metode Deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menafsirkan makna sosial, ideologis, serta relasi kekuasaan yang direpresentasikan dalam teks dan praktik kesusastraan Palestina di tengah konflik Israel–Palestina. Penelitian deskriptif menekankan proses penafsiran dan penyajian data dalam bentuk uraian yang mendalam (Ratna, 2004), sehingga relevan untuk mengkaji berbagai bentuk pembungkaman, pembatalan acara sastra, hingga tekanan terhadap sastrawan Palestina di ranah global. Sementara itu, Metode Kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam suatu fenomena sosial melalui pemaknaan yang kontekstual (Fadli, 2021), khususnya terkait pengalaman sastrawan Palestina dalam medan konflik dan sensor kultural.

Sumber utama penelitian ini adalah kasus-kasus yang menimpa sastrawan Palestina yaitu pembatalan penganugerahan penghargaan di Frankfurt Book Fair (2023) kepada Adaniya Shibli, pembatalan pembacaan puisi Mohammed el-Kurd di University of Vermont (2023), serta tidak diundangnya penulis Palestina-Australia Randa Abdel-Fattah dalam Adelaide Writers’ Week 2026 (D. Clark, 2020; D’Auria, 2023; Mahmudah, 2025). Data dikumpulkan melalui studi dokumen atas pernyataan resmi, laporan media, surat protes dan wawancara publik terkait ketiga kasus.

Analisis data dilakukan dengan Metode Deskriptif-Interpretatif, yakni dengan mendeskripsikan terlebih dahulu data tekstual (pernyataan resmi penyelenggara, tulisan opini, liputan media, pernyataan, hingga sikap sastrawan yang telah diklasifikasikan berdasarkan bentuk perlakuan dan dampaknya, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran menggunakan kerangka teori tentang kekerasan struktural, kebebasan berekspresi dan hegemoni wacana dalam konflik politik-kultural. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menguraikan data secara naratif, tetapi juga memberikan penjelasan teoritis secukupnya untuk menunjukkan hubungan antara praktik pembungkaman terhadap sastrawan Palestina dan konstruksi kekuasaan global atas wacana konflik Israel–Palestina (Ratna, 2004). Keabsahan temuan dijaga dengan melakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara pernyataan institusi, liputan media dan respons publik pada setiap kasus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pembacaan yang sistematis, terukur dan argumentatif dalam menganalisis bentuk dan dampak tekanan terhadap sastrawan Palestina, termasuk bagaimana mereka memanfaatkan ruang alternatif, seperti internet dan *platform* digital, untuk mempertahankan suara dan narasi mereka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pembatalan Penghargaan Frankfurt Book Fair 2023

Kasus pembatalan pemberian anugerah oleh LiBeraturpreis 2023 kepada penulis Palestina, Adania Shibli, di ajang penghargaan sastra Frankfurt Book Fair (2023) termasuk dalam bentuk gamblang dari fenomena pembungkaman narasi Palestina di panggung sastra internasional. Adania Shibli, seorang novelis terkemuka kelahiran Palestina sedianya dijadwalkan untuk menerima penghargaan tersebut yang secara khusus ditujukan bagi penulis perempuan dari Afrika, Asia, Amerika Latin dan Timur Tengah, beserta menerima hadiah sebesar 3000 euro pada 20 Oktober 2023 (Oltermann, 2023). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi untuknya berkat novelnya yang memukau, *Tafsil Tsanawi* (diterjemahkan ke berbagai bahasa internasional, termasuk bahasa Inggris, dengan judul *Minor Detail*). Novel itu secara garis besar merupakan medium yang Adania Shibli pakai untuk menarasikan sejarah buruk berupa kekerasan yang dilakukan Israel terhadap penduduk Palestina. Novel ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengungkap peristiwa

faktual di bulan Agustus tahun 1949, sekelompok tentara Israel melakukan penculikan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan terhadap gadis Badui di gurun Negev. Kejahatan ini tervalidasi oleh arsip militer yang terungkap oleh surat kabar. Haaretz pada tahun 2003. Bagian kedua novel ini merupakan cerita yang digambarkan terjadi setelah lima puluh tahun kemudian. Pada bagian ini diceritakan ada seorang gadis dari Ramallah yang berupaya menelusuri jejak pembunuhan tersebut, namun diharuskan menghadapi realitas penjajahan yang berlapis, pos pemeriksaan militer Israel dan juga pembatasan oleh Israel yang ekstrem (Mahmudah, 2025).

Peristiwa pembatalan penghargaan yang diterima Adania Shibli sebagai perwakilan suara Palestina, memperlihatkan ada kekejian pembatalan secara sepihak dan juga ada manipulasi fakta oleh institusi terkait (Oltermann, 2023). Hanya beberapa hari menjelang upacara penyerahan penghargaan dilaksanakan, asosiasi *LitProm* yang berasal dari Jerman ini secara tiba-tiba mengumumkan pembatalan agenda. Langkah ini diambil dengan alibi memanasnya situasi global usai serangan Hamas dan mendeklarasikan bahwa FBF berdiri dalam “solidaritas penuh di pihak Israel (Publishers for Palestine, 2025). Pada saat yang bersamaan FBF bahkan menjanjikan untuk memperbanyak program dan panggung bagi suara-suara Israel dan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina yang tengah dibombardir (Nugraha, 2023).

Lebih ironis lagi, *LitProm* mencoba memanipulasi opini publik dengan mendeklarasikan klaim mereka bahwa penundaan acara tersebut adalah keputusan bersama yang juga telah disetujui oleh Adania Shibli (Oltermann, 2023). Di sisi lain, pihak Adania Shibli, Agensi sastra Shibli membantah kebenaran klaim tersebut. Dia menyatakan bahwa Shibli belum pernah dimintai persetujuan dan hanya menerima pemberitahuan pembatalan yang singkat yang disampaikan melalui email. Penulis Suriah Muhammad at-Attar, menyebut klaim palsu panitia sebagai tindakan yang memalukan (Mahmudah, 2025). Agensi Shibli menegaskan jika acara tetap berjalan, Shibli sebenarnya sudah merencanakan menggunakan momentum pidatonya untuk merefleksikan peran penting sastra dalam merespons situasi yang kejam ini (Oltermann, 2023).

Keputusan FBF ini sebenarnya tidak lahir dari ruang hampa, melainkan akumulasi dari tekanan politik yang merepresentasikan politik pro-Israel di

Jerman. Sebelum pembatalan digaungkan, novel *Shibli* ini telah menjadi sasaran kampanye hitam di Jerman. Seorang jurnalis Jerman, Ulrich Noller, secara demonstratif mengundurkan diri dari kursi juri sebagai bentuk protes dan unjuk rasa atas terpilihnya novel *Shibli* ini. Dia menuduh bahwa buku tersebut membentuk stigma bahwa Israel adalah mesin pembunuh (Oltermann, 2023). Surat kabar *Die Tageszeitung* bahkan membangun narasi yang menuduh novel tersebut anti-Semit, karena dianggap membentuk asumsi general bahwa semua orang Israel sebagai pemerkosa dan pembunuh. Tindakan ini sebenarnya selaras dengan garis politik negara Jerman, Kanselir Olaf Scholz secara terbuka mendukung Israel untuk membela diri dan Parlemen Jerman (Bundestag) sejak tahun 2019 juga telah menetapkan gerakan boikot pro Palestina (BDS) sebagai tindakan ilegal yang dinilai berbau anti-Semit (Publishers for Palestine, 2025).

Tragedi ini akhirnya memacu Reaksi Global, boikot institusional dan sikap tegas pembelaan Palestina. Protes massal dengan memutuskan penarikan diri dari FBF dilakukan oleh berbagai institusi literatur negara kawasan Selatan. Organisasi penerbitan ternama dari Arab, Arab Publishers Association, Emirates Publisher Association dan Sarjah Book Authority menarik diri dari partisipasi FBF sebagai bentuk boikot (Publishers for Palestine, 2025). Selain itu, di negara bagian Asia, pemerintah Malaysia juga menarik diri dari FBF dengan prinsip Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menolak tekanan Barat dan bersolidaritas penuh dengan Palestina (Mahmudah, 2025). Indonesia melalui Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Mizan Group, dan Pusat Perbukuan menyatakan batal menghadiri acara FBF. Dalam rilis pers resminya, Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha, melayangkan pernyataan kritik tajam dengan menyatakan bahwa keputusan yang dilakukan FBF yang hanya memihak Israel ibarat “membaca satu buku merasa telah memahami seisi dunia”. IKAPI juga menyoroti kemunafikan pameran buku terbesar tersebut, menyebut tindakan memperluas panggung bagi Israel sembari membungkam suara Palestina adalah cerminan nyata dari “ekspansi pemukiman ilegal Israel di atas tanah Palestina” (Nugraha, 2023).

Penolakan terhadap represi FBF mengkonsolidasikan perlawanan dari ribuan figur sastra. Ini merupakan bentuk solidaritas komunitas sastrawan global. Publishers for Palestine, sebuah lembaga global yang beranggotakan lebih dari 600 penerbit dari 50 negara, menyerukan boikot total

terhadap FBF atas keterlibatan mereka dalam normalisasi *apartheid* dan peminggiran suara sastra Palestina (Publishers for Palestine, 2025). Sebuah surat terbuka yang dilansir *The Guardian* ditandatangani oleh lebih dari 350 intelektual dunia, termasuk peraih Pulitzer Hisham Matar, sejarawan William Dalrymple, serta novelis Colm Toibin dan Kamila Shamsie. Mereka memperingatkan bahwa FBF bertanggung jawab untuk membuka ruang diskusi, bukan menutupnya di saat krisis kemanusiaan terjadi. Dukungan lain juga lahir dari surat protes Arab Quarterly yang berhasil mengumpulkan lebih dari seribu tanda tangan, diantaranya petisi oleh peraih Nobel Sastra seperti Olga Tokarczuk, Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux. Organisasi pembela kebebasan berbicara, PEN America secara tegas juga mengecam FBF, menyebut bahwa pembatalan penghargaan atas dasar kewarganegaraan demi menghindari kontroversi adalah tindakan diskriminatif yang pengecut (Mahmudah, 2025).

Lebih lanjut (Mahmudah, 2025) menyampaikan bahwa puncak ironi dari penyensoran ini, karya *Shibli* ini justru mengalami publisitas luar biasa. Penerbit Fitzcarraldo Editions di Inggris dan Berenberh Verlag di Jerman mengedarkan e-book novel secara gratis selama pameran berlangsung, sementara para kreator BookTok mengadakan readathon selama berminggu-minggu agar narasi penindasan rakyat Palestina terdengar di seluruh dunia. Universitas ternama seperti University of North Carolina dan Duke University juga melakukan dukungan dengan memberi panggung penghormatan bagi *Shibli* untuk menyuarakan gagasannya. Secara keseluruhan kasus *Frankfurt Book Fair 2023* merepresentasikan bias ideologis institusi sastra secara global, namun juga membuktikan bahwa upaya pembungkaman narasi hanya melahirkan gombang perlawanan dari adanya solidaritas yang semakin tidak terbelah.

Pembatalan Pembacaan Puisi dan Kuliah Mohammed El Kurd di University of Vermont (AS)

Kasus pembatalan kuliah tamu Mohammed El-Kurd di Universitas Vermont (UVM) menjadi gambaran nyata bagaimana suara Palestina kerap disisihkan di lingkungan akademik Barat (D'Auria, 2023). El-Kurd sendiri adalah sastrawan sekaligus jurnalis Palestina yang telah meraih berbagai penghargaan. Ia dijadwalkan hadir pada 26 Oktober 2023 untuk membahas representasi Palestina di Amerika Serikat. Acara ini merupakan hasil kerja sama antara Will Miller Social Justice Lecture

Series, Departemen Sosiologi dan Departemen Bahasa Inggris UVM, namun hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan, UVM tiba-tiba mencabut izin penggunaan gedung. Pihak kampus berdalih keputusan ini diambil karena kekhawatiran terhadap keselamatan yang dianggap tidak bisa diantisipasi, dengan merujuk pada eskalasi konflik antara Israel dan Hamas di Timur Tengah (D'Ambrosio, 2023). Keputusan sepihak ini langsung menuai kritik, terutama karena alasan di balik pembatalan tidak disampaikan secara transparan. Divisi Keselamatan dan Kepatuhan UVM hanya mengirimkan email pemberitahuan tanpa identitas atau tanda tangan yang jelas, dari sisi penyelenggara, Fred Magdoff dan rekan-rekannya menilai situasi ini janggal. Mereka menduga alasan keamanan yang dikemukakan hanyalah dalih untuk menyingkirkan acara yang dianggap tidak sejalan dengan preferensi administrasi kampus (Kobus, 2023).

Berbagai pihak merespons keras pembatalan ini. Anne Peterman dari Global Justice Ecology Project menilai langkah UVM sebagai bentuk penyensoran yang kental dengan nuansa Islamofobia. Sementara itu Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) menyoroti pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan hak mahasiswa. Di sisi lain, mahasiswa UVM, termasuk Union of Students dan Students for Justice in Palestine, turun ke jalan bersama sekitar 100 peserta aksi (Langelles, 2023). Mereka menyoroti adanya pola rasisme dan menilai kehadiran orang Palestina kerap dipandang sebagai ancaman. Tak hanya itu, ribuan surat protes juga dikirimkan ke administrasi UVM melalui kampanye surat terbuka (Action Network, t.t.). Akhirnya, acara tetap berlangsung secara daring dan justru berhasil menarik lebih dari 1000 penonton. Dalam pidatonya, El-Kurd menyoroti standar ganda yang kerap dihadapi warga Palestina. Ia menegaskan bahwa institusi sering hanya memberi ruang bagi suara Palestina yang dianggap 'jinak', apolitis, atau tampak lemah (Kobus, 2023). Ketika ada yang berbicara lantang tanpa menunjukkan sikap pasrah, mereka justru dicurigai dan statusnya sebagai korban pun dipertanyakan.

Secara sistematis, terdapat kemiripan yang signifikan antara kejadian yang menimpa Mohammed El-Kurd di UVM dengan pembatalan Dr. Walaa Alqaisiya di Academy of Fine Arts Vienna (Austria), sebagaimana diulas dalam kajian mengenai "arsitektur pembungkaman" (Achenbacha dkk., 2024). Kesamaan tersebut setidaknya dapat dikategorikan dalam tiga hal

utama, *Pertama* Proses Pembatalan yang tidak ada transparansi. Kejadian pembatalan yang terjadi pada kuliah Mohammed El-Kurd, penyelenggara hanya menerima email anonim dari divisi keamanan UVM. Hal yang persis terjadi pada acara Dr. Alqaisiya di Wina. Ia dibatalkan di menit-menit terakhir hanya melalui panggilan telepon tanpa proses yang etik dan sah. Bahkan namanya seketika dihapus dari program daring tanpa ada penjelasan publik dari pihak akademik.

Kedua, pola mitigasi oleh instansi terkait. Pola ini selalu diadakan oleh instansi terkait untuk meredakan kontroversi, instansi terkait berusaha mengubah format acara agar terhindar dari sorotan luas. UVM mengklaim mereka berusaha menawarkan "penjadwalan ulang", namun ditolak oleh penyelenggara yang memilih pelaksanaan secara daring. Sementara itu, akademi di Wina menawarkan agar kuliah Dr. Alqaisiya dialihkan menjadi sesi tertutup yang eksklusif. Alqaisiya menolak tawaran ini karena bagaimanapun masih dengan pola yang sama yaitu penyensoran kajian dari audiens umum.

Ketiga, Dalih Keamanan dan Antisemitisme sebagai alibi. UVM menggunakan alibi "keamanan dan keselamatan" sebagai pembelaan atas pembatalan tersebut. Hal ini dihadirkan untuk melakukan sensor terhadap politik mereka. Di Austria, akademisi menggunakan tuduhan tak berdasarkan tentang antisemitisme dan transfobia untuk mendiskreditkan akademisi anti-Zionis Dr. Alqaisiya. Dalam kedua kasus ini, instansi mengonstruksi narasi rasis bahwa keberadaan suara Palestina berbahaya dan mengancam kenyamanan politik mereka.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan yang diterima El-Kurd dan Alqaisiya, yang sama-sama berasal dari Palestina, merupakan bentuk nyata bahwa institusi sudah ikut andil dalam memegang kendali atas siapa yang diperbolehkan berbicara dan siapa yang didengar. Suara-suara Palestina dipaksa tunduk kepada alibi birokratis yang berpihak pada Israel. Pada kasus ini, dalih keamanan berfungsi sebagai mekanisme hegemoni yang menormalisasi pembatasan suara Palestina.

Pembungkaman Suara pada Acara *Adelaide Writers' Week* (AWW)

Adelaide Writers' Week (AWW) merupakan salah satu festival sastra tertua dan terbesar di Australia. Baru-baru ini, festival ini menjadi perhatian setelah dewan penyelenggara membatalkan kehadiran Dr.

Randa Abdel-Fattah secara sepihak (Rowlands, 2026). Abdel-Fattah adalah penulis peraih penghargaan dan akademisi berdarah Palestina-Australia. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlakuan terhadap identitas Palestina, terutama ketika kontribusi seorang penulis dapat diabaikan berdasarkan pertimbangan politik penyelenggara. Pembatalan tersebut terjadi menjelang sesi Abdel-Fattah yang akan membahas novel terbarunya, *Discipline*, yang berfokus pada isu rasisme institusional (Phillips, 2026).

Alasan utama yang disampaikan dewan AWW untuk membatalkan kehadiran Abdel-Fattah adalah alasan “sensitivitas budaya” setelah terjadinya penembakan massal di Bondi pada Desember 2025 (McIlwraith, 2026), namun, dewan juga menyatakan secara terbuka bahwa Abdel-Fattah tidak memiliki hubungan apapun dengan insiden tersebut. Dalam podcast *Full Story* di kanal YouTube *Guardian Australia*, Abdel-Fattah membahas bagaimana tragedi tersebut digunakan untuk menggeser diskursus dan berpendapat bahwa peristiwa Bondi dimanfaatkan institusi untuk mendiskreditkan perjuangan Palestina (Australia, 2026).

Abdel-Fattah sebagai akademisi yang fokus pada isu anti-rasisme menyoroti konsep “keamanan budaya” disalahgunakan oleh dewan festival. Konsep ini pada dasarnya bertujuan melindungi kelompok rentan dari rasisme sistemik, namun dalam kasus ini, digunakan untuk menghindari kritik terhadap praktik kolonialisme pemukim. Penggunaan “keamanan budaya” sebagai alasan untuk menolak kritik atas tindakan kekerasan menimbulkan pertanyaan tentang peran institusi sastra dalam memperlakukan individu Palestina dan potensi munculnya stigma tidak berdasar (McIlwraith, 2026).

Jika dicermati secara struktural, kasus ini memperlihatkan betapa timpangnya relasi kekuasaan yang terjadi, terutama ketika represi berlangsung dengan restu langsung dari elit politik (Phillips, 2026). Dalam hal ini, Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas secara terbuka menolak kehadiran Abdel-Fattah, menggunakan retorika yang secara halus namun jelas mengaitkannya dengan terorisme ekstremis. Menariknya, Abdel-Fattah tidak tinggal diam. Ia memilih jalur hukum, mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk penindasan brutal

terhadap warga sipil oleh otoritas eksekutif tertinggi (Kellaway & Gabrielle, 2026).

Karena itu, persoalan yang muncul di sini sebenarnya melampaui sekadar perdebatan soal kebebasan berbicara, yang tampak justru adalah demonstrasi nyata dari dominasi kekuasaan hegemonik yang bekerja secara terbuka. Secara sistematis bisa terlihat adanya kemunafikan institusional ini semakin jelas jika membandingkan perlakuan terhadap penulis yang membawa narasi pro-Israel (Australia, 2026). Dalam wawancara yang sama pada saluran YouTube, Abdel-Fattah menyampaikan bagaimana tulisan-tulisan rasis Thomas Friedman yang bahkan membandingkan penduduk Timur Tengah dengan serangga, diterima begitu saja oleh kalangan elit sastra. Fenomena ini memperlihatkan adanya standar ganda, retorika yang menghasut genosida dibiarkan, sementara suara korban justru dibungkam. Pada akhirnya, Direktur AWW, Louise Adler, memilih mundur sebagai bentuk protes. Ia memperingatkan bahwa sikap dewan yang tunduk pada tekanan lobi politik pro-Zionis menjadi sinyal runtuhnya kebebasan berbicara dan demokrasi di institusi budaya.

Boikot massal muncul sebagai reaksi langsung terhadap tindakan sensor ini dan jumlahnya bertambah dengan cepat. Sekitar 180 penulis memilih mundur yang akhirnya menyebabkan pembatalan seluruh rangkaian acara AWW 2026 (Rowlands, 2026). Salah satu faktor utama dalam perlawanan ini adalah keterlibatan penuh penulis *First Nations*, termasuk Evelyn Araluen, Chelsea Watego dan Melissa Lucashenko. Solidaritas yang terbentuk di sini bukan sekadar soal empati, melainkan hasil dari kesadaran dekolonial bersama di antara kelompok yang mengalami dampak kolonialisme. Araluen menyoroti bahwa menghilangkan Palestina dari ruang publik tidak akan menghentikan antisemitisme dan ia menolak untuk terlibat dalam praktik sensor yang dianggap manipulatif (Ore & Burke, 2026).

Boikot ini memperlihatkan bahwa solidaritas di tingkat akar rumput mampu menantang dominasi kelompok berkuasa dan media utama. Pola perlawanan seperti ini juga pernah muncul saat sensor di Festival Penulis Bendigo berhasil digagalkan. Tekanan dari boikot kolektif yang berdampak pada reputasi festival membuat dewan AWW akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan mengundang Abdel-Fattah untuk hadir kembali pada tahun 2027 (Rowlands, 2026).

Abdel-Fattah menolak permintaan maaf itu, dengan alasan dewan tidak benar-benar tulus. Ia menilai dewan hanya menyesali cara penyampaian pembatalan, bukan masalah rasisme anti-Palestina yang menjadi inti keputusan mereka. Kasus AWW menjadi preseden penting secara akademis, terutama bagi mahasiswa pascasarjana dan menyoroti perlunya pendidikan anti-rasisme yang menyeluruh di ruang publik. Dalam konteks ini, pembungkaman tidak hanya terjadi melalui pembatalan atau sanksi terbuka, tetapi juga melalui iklim sosial yang menyebabkan individu yang tidak sejalan dengan nilai dominan menjadi enggan menyampaikan pandangannya secara terbuka (Norris, 2023). Selain itu, label *cancel culture* perlu dikaji secara kritis karena dapat berfungsi sebagai *counter-frame* yang mereduksi praktik akuntabilitas digital dan bahkan membungkam kelompok termarginalkan yang memanfaatkan ruang daring untuk menyuarakan kritik (D. Clark, 2020). Selain itu, perlindungan institusional yang kuat dibutuhkan agar wacana budaya tidak dimanfaatkan oleh kelompok politik untuk membungkam advokasi atas pelanggaran hak asasi manusia dan genosida di Palestina. Ketiga kasus tersebut menunjukkan pola serupa yaitu institusi menggunakan bahasa netral untuk menyamarkan keputusan politik, sementara respons publik mengungkap struktur kekuasaan yang berperan dalam proses pembungkaman.

KESIMPULAN

Kasus pembatalan penghargaan di *Frankfurt Book Fair* 2023, pembatalan kuliah Mohammed El-Kurd di University of Vermont dan pembatalan undangan Randa Abdel-Fattah di *Adelaide Writers' Week* 2026 menunjukkan adanya pola konsisten dalam praktik penyensoran narasi Palestina di ranah budaya dan akademik. Ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa institusi terkait cenderung menggunakan justifikasi yang dikemas secara netral, seperti alasan keamanan, sensitivitas budaya, atau stabilitas politik, untuk membatasi ekspresi yang berkaitan dengan pengalaman dan kritik terhadap isu Palestina. Dalam setiap kasus, keputusan diambil secara sepihak dan tingkat transparansi yang rendah.

Ketiga kasus tersebut secara khusus menunjukkan penggunaan alibi yang serupa yaitu mengaitkan narasi Palestina dengan Hamas atau anti-Semitisme, termasuk pada kasus ketiga di mana insiden Bondi juga dikaitkan dengan isu anti-Semit.

Pola ini mengindikasikan adanya standar ganda dalam kebebasan berekspresi, suara yang mendukung kepentingan politik dominan tetap memperoleh ruang, sedangkan narasi Palestina dibatasi. Intervensi aktor politik, tekanan ideologis dan penggunaan stigma antisemitisme atau ancaman keamanan menjadi pola berulang yang digunakan sebagai justifikasi. Ketiga kasus ini juga memunculkan respons global berupa solidaritas lintas negara dan profesi yang menunjukkan bahwa upaya pembungkaman tersebut memicu resistensi kolektif. Pada kasus ketiga, respons ini menghasilkan permintaan maaf dari pihak penyelenggara. Secara keseluruhan, fenomena ini tidak dapat dipahami sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai bagian dari struktur yang lebih luas dalam pengendalian wacana yaitu narasi Palestina secara sistematis ditempatkan dalam posisi yang rentan untuk dibatasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Magister Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, dan Universitas Gadjah Mada. Terkhusus kepada rekan kelas mata kuliah Kesusastraan Arab Modern dan Ibu Mahmudah selaku dosen yang sudah ikut andil menjadi rekan diskusi dalam seluruh proses penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Achenbacha, A., Hordijk, R., Kawaumic, M., Roodd, M., & Tatar, A. (2024). Witnessing the Architecture of a Cancellation: The Silencing of Voices on Palestine in Austrian Academia. *Middle East Critique*, 33(3), 377–395. <https://doi.org/10.1080/19436149.2024.2348942>
- Action Network. (t.t.). *Let Mohammed El-Kurd Speak At UVM*. Diambil 28 Mei 2026, dari <https://actionnetwork.org/letters/let-mohammed-el-kurd-speak-at-uvvm>
- Amer, M., & Ashour, R. M. M. (2026). Protection of Palestinian journalists: Analysing Israeli violations during the Gaza War 2023–2025 within the framework of international humanitarian law. *Media, War & Conflict*. <https://doi.org/10.1177/17506352261424833>
- Australia, G. (2026, Januari 16). *Randa Abdel-Fattah speaks to Nour Haydar about the Adelaide festival – Full Story podcast* [Broadcast].

- <https://doi.org/https://youtu.be/KYd-rMcapz0?si=a09Fonw-ZuONP4ot>
- D. Clark, M. (2020). Drag Them: A Brief Etymology of So-Called “Cancel Culture.” *Communication and the Public*, 5(3–4), 88–92. <https://doi.org/10.1177/2057047320961562>
- D’Ambrosio, D. (2023, Oktober 25). UVM Blames War Between Israel and Hamas for Cancelling Palestinian Speaker. *Burlington Free Press*. <https://www.burlingtonfreepress.com/story/news/2023/10/25/uvm-cancels-palestinian-speaker-mohammed-el-kurd-middle-east-war/71304336007/>
- D’Auria, P. (2023, Oktober 23). Citing Safety Concerns, University of Vermont Cancels Event with Palestinian Writer. *vtdigger*. <https://vtdigger.org/2023/10/23/citing-safety-concerns-university-of-vermont-cancels-event-with-palestinian-writer/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kellaway, E., & Gabrielle. (2026, Januari 19). Adelaide Writers’ Week has been Cancelled, Randa Abdel-Fattah Launches Legal Action. *Māori Television Service*. <https://www.teaonews.co.nz/2026/01/19/adelaide-writers-week-has-been-cancelled-randa-abdel-fattah-launches-legal-action/>
- Kobus, E. (2023, November 6). UVM Cancels in-Person Lecture with Award-Winning Palestinian Writer. *The Vermont Cynic*. <https://vetcynic.com/news/uvm-cancels-in-person-lecture-with-award-winning-palestinian-writer/>
- Langelle, O. (2023, Oktober 26). Burlington Free Press: UVM Blames War Between Israel and Hamas for Cancelling Palestinian Speaker. *Global Justice Ecology Project*. <https://globaljusticeecology.org/burlington-free-press-uvm-blames-war-between-israel-and-hamas-for-cancelling-palestinian-speaker/>
- Mahmudah. (2025). Menelusik Akar Perlawanan Palestina Terhadap Pendudukan Israel Melalui Novel Tafṣīl Šānawī Karya Adania Shibli: Tinjauan Awal Berperspektif Poskolonial. Dalam *Palestina: Dari Nakbah Hingga Tufan al-Aqsa*.
- McIlwraith, P. (2026, Januari 9). First Nations Authors Join Boycott of Adelaide Writers’ Week Over the Removal of Palestinian Guest. *NITV Newsletter*. <https://www.sbs.com.au/nitv/article/first-nations-authors-join-boycott-of-adelaide-writers-week-over-the-removal-of-a-palestinian-guest/wpw249bo9>
- Norris, P. (2023). Cancel Culture: Myth or Reality? *Political Studies*, 71(1), 145–174. <https://doi.org/10.1177/00323217211037023>
- Nugraha, A. H. (2023, Oktober 16). Press Statement from the Indonesian Publishers Association about 2023 Frankfurt Book Fair. *IKAPI*. <https://www.ikapi.org/language/en/2023/10/16/the-indonesian-publishers-association-press-statement-about-frankfurt-book-fair-2023/>
- Oltermann, P. (2023). Palestinian Voices ‘Shut Down’ at Frankfurt Book Fair, Say Authors. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/15/palestinian-voices-shut-down-at-frankfurt-book-fair-say-authors>
- Ore, A., & Burke, K. (2026, Januari 8). Almost 50 Writers Boycott Adelaide Festival After It Dumps Palestinian Academic Randa Abdel-Fattah. *Guardian News & Media Limited*. <https://www.theguardian.com/culture/2026/jan/09/adelaide-festival-boycott-pro-palestine-academic-randa-abdel-fattah-ntwnfb>
- Phillips, R. (2026, Januari 9). Australian Writers’ Festival Bans Randa Abdel-Fattah in Pro-Zionist Purge Backed by Labor. *World Socialist Web Site*. <https://www.wsws.org/en/articles/2026/01/10/oqss-j10.html>
- Publishers for Palestine. (2025, Januari 29). International Publishers Call for a Boycott of the Frankfurt Book Fair. *Publishers for Palestine*. <https://publishersforpalestine.org/2025/01/30/international-publishers-call-for-a-boycott-of-the-frankfurt-book-fair/>
- Ratna, N. Kutha. (2004). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana naratif*. Pustaka Pelajar.
- Rowlands, L. (2026, Januari 15). Australian Writers’ Festival Apologises to Palestinian Author after Boycott. *Al Jazeera Media Network*. <https://www.aljazeera.com/news/2026/1/15/australian-writers-festival-apologises-to-palestinian-author-after-boycott>